

**SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen dan Akuntansi**

Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2021

Website: <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/surplus>

---

**ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Ifrah Juli Dwiyanti<sup>1</sup>, Jumania Septariani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE Rahmadiyah Sekayu, Indonesia, [ifrah1697@gmail.com](mailto:ifrah1697@gmail.com)

<sup>2</sup>STIE Rahmadiyah Sekayu, Indonesia, [jseptariani@gmail.com](mailto:jseptariani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aimed to measure the implementation of performance-based budgeting and the quality of budget realization reported at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Musi Banyuasin Regency. The method used in this study was a qualitative and quantitative analysis technique by describing the reality of situation or an object in the form of a description based on information from parties related to the study. The data analysis used in this study was an income performance analysis, spending growth analysis and conformity budget analysis. Musi Banyuasin Regency has implemented performance-based budgeting so well. This could be seen from the LKJIP which stated that performance achievement was measured by comparing performance realization with performance targets achieved. Based on the ratio of financial independence, Musi Banyuasin Regency was still very low. It was included in a consultative relationship pattern which means that the role of the central government was more dominant than the regional government. This was indicated by the independence ratio of Musi Banyuasin Regency from 2016-2019, which was 50%. However, in total, Musi Banyuasin Regency was said to have a good income performance because it was able to earn income that exceeds the budgeted amount.*

**Keywords :** *Performance Based Budget, Quality of Budget, Budget Realization Report*

**PENDAHULUAN**

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan realisasi anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas. Indonesia telah

menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagai pengganti dari penganggaran tradisional. Pada penganggaran tradisional, kinerja diukur dari input. Hal ini menimbulkan perilaku pegawai yang selalu menghabiskan anggaran tanpa mempedulikan hasil dan kualitasnya. Dengan digunakannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), anggaran tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran (*input*) tetapi pada hasil kinerja yaitu *output* dan *outcome* anggaran. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diterapkan pemerintah dalam upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat dan sistematis.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Banyak potensi daerah yang bisa digali untuk dijadikan sumber pendapatan yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran, telekomunikasi dan transportasi, dan industri yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
I	Pendapatan	2016	2.849.225.683.981	2.640.255.197.404	92.67
		2017	2.876.720.007.058	2.642.776.006.641	91.05
		2018	2.979.978.607.000	3.019.699.825.935	103.33
		2019	3.688.474.554.548	3.941.909.794.940	106.87
II	Belanja	2016	2.863.436.764.000	2.625.127.073.234	91.68
		2017	2.877.072.560.218	2.619.480.025.846	91.05
		2018	3.480.078.607.000	2.958.060.291.945	85.00
		2019	3.525.077.794.799	3.160.193.342.676	89.64
	a. Belanja Tidak Langsung	2016	1.477.492.605.059	1.333.993.671.559	90.28
		2017	1.234.247.138.200	1.057.672.408.314	85.69
		2018	1.308.090.839.647	1.180.274.015.975	90.22
		2019	2.331.011.570.585	2.056.860.843.111	88.23
	b. Belanja Langsung	2016	1.385.944.158.940	1.291.133.401.684	93.15
		2017	1.642.825.422.038	1.561.807.617.532	95.06
		2018	2.171.987.767.353	1.777.786.275.970	81.85
		2019	1.216.773.668.536	1.114.150.758.470	1.35

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020 data diolah

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018 melampaui anggaran yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 2.979.978.607.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.019.699.825.935 yaitu dengan persentase sebesar 103,33%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air bawah tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 sangat efektif, karena realisasi anggaran lebih rendah dari pada belanja yang dianggarkan. Dalam pelaksanaan kinerja pendapatan dilihat dari laporan realisasi anggaran, permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah nilai anggaran melebihi nilai realisasi. Sedangkan dalam pelaksanaan

kinerja belanja, permasalahan secara umum pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah terlambatnya pengesahan APBD perubahan tahun anggaran atau revisi anggaran, adanya bencana alam yang mengakibatkan penghentian dan pemutusan kontrak pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh berupa angka dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2016-2019 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung :

### 1. Analisis Kinerja Pendapatan

Menurut Mahmudi (2011:162), dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan

$$\text{Varians Anggaran Pendapatan} = \text{Realisasi APBD} - \text{Anggaran APBD}$$

### 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{pertumbuhan pendapatan tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan Tahun } t-1} \times 100\%$$

### 3. Analisis Rasio Keuangan

#### a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Jika nilai derajat desentralisasi > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Sebaliknya jika nilai derajat desentralisasi < 50%, maka daerah dikatakan belum cukup mandiri karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat cukup tinggi.

#### b. Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Persentase	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
0-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25-50%	Rendah	Konsultif
50-75%	Sedang	Partisipatif
75-100%	Tinggi	delegatif

Sumber : Mahmudi (2011:162)

## 2. Analisis Kinerja Belanja

### a. Analisis Varians (selisih) Belanja

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Anggaran Belanja}$$

### b. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

### c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja keuangan dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran belanja. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016-2019, berikut ini cara menganalisis kinerja Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) :

### Analisis Kinerja Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019

Secara umum kinerja pendapatan terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerja dapat dinilai baik. Tetapi penilaian kinerja pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah melampaui target anggaran namun perlu dilihat lebih lanjut komponen apa saja yang paling berpengaruh.

### Analisis Kinerja Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin

#### a. Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja keuangan pendapatan. Berikut ini tabel perhitungan varians pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin :

**Tabel 2. Analisis Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan			
	APBD	Realisasi	Selisih	%
2016	2.849.225.683.981	2.640.255.197.404	(205.970.486.577)	92.67
2017	2.876.720.007.058	2.642.776.006.641	(233.944.000.417)	91.05
2018	2.979.978.607.000	3.019.699.825.935	39.721.218.935	10.33
2019	3.688.474.554.548	3.941.909.794.940	253.435.210.392	106.87
Total	12.394.398.825.587	12.244.640.824.920	(149.758.000.667)	98.79

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 2 di atas, dari keempat periode yang diteliti sebagian mengalami selisih lebih dan sebagian lagi mengalami selisih kurang, yaitu pada tahun 2016-2017 mengalami selisih kurang dan pada tahun 2018-2019 mengalami selisih lebih. Secara umum dilihat dari analisis varians pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase sebesar 98,79%. Persentase tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 106,87% sedangkan persentase terendah pada tahun 2018 sebesar 10,33%.

### Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

#### 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016

**Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Pertumbuhan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	181.795.444.466	169.012.416.526	(12.783.027.940)	(7.03)
Pendapatan Transfer	1.723.626.133.366	2.327,685.024.463	604.358.891.097	35.06
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	128.979.766.735	143.557.756.415	14.577.989.680	11.30
Total	2.034.401.344.567	2.640.255.197.404	605.853.852.837	29.78

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar 7,03%. Penurunan pertumbuhan pendapatan disebabkan karena adanya penurunan pada pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah dari tahun sebelumnya. Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 35,06% dari tahun sebelumnya, kenaikan pertumbuhan pendapatan transfer disebabkan karena adanya kenaikan pada bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi desa dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 11,30%, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan pada pendapatan hibah dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari total pertumbuhan pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif yaitu sebesar 29,78%.

## 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017

**Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Pertumbuhan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	169.012.416.526	209.410.035.753	40.397.619.227	23.9
Pendapatan Transfer	2.327,685.024.463	2.284.442.011.973	(43.243.012.490)	(1.85)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	143.557.756.415	148.923.958.915	5.366.202.500	3.73
Total	2.640.255.197.404	2.642.776.006.641	2.510.809.237	0,09

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 4 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif sebesar 23,9%. Kenaikan pertumbuhan PAD disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan PAD yang sah seperti kenaikan pada penerimaan jasa giro dan pendapatan denda pajak. Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan pendapatan secara negatif sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya, penurunan pertumbuhan pendapatan ini disebabkan karena adanya penurunan pada bagi hasil pajak dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif sebesar 3,73% dari tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan hibah. Jika dilihat dari total pertumbuhan pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif sebesar 0,09%.

## 3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2018

**Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Pertumbuhan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	209.410.035.753	210.238.037.283	828.001.530	0.39
Pendapatan Transfer	2.284.442.011.973	2.399.445.440.610	115.003.428.637	5.03
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	148.923.958.915	410.016.384.041	261.092.425.126	175.3
Total	2.642.776.006.641	3.019.699.861.934	386.923.855.293	14.6

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 5 di atas, pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan secara positif yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,39%. Kenaikan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan pajak daerah, seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan transfer mengalami pertumbuhan secara

positif sebesar 5,03% dari tahun sebelumnya, kenaikan pertumbuhan disebabkan karena adanya kenaikan pada bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi umum sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan secara positif cukup tinggi yaitu sebesar 175,3%, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada lain-lain pendapatan yang sah. Secara umum analisis pertumbuhan daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan secara positif yang ditunjukkan dengan total pertumbuhan pendapatan sebesar 14,6%.

#### 4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019

**Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	210.238.037.283	286.594.847.515	76.356.810.232	36.31
Pendapatan Transfer	2.399.445.440.610	3.302.686.527.069	903.241.086.459	37.64
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	410.016.384.041	352.682.420.356	(57.333.963.685)	(0.13)
Total	3.019.699.861.934	3.941.963.794.940	922.263.933.006	30.54

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 6 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif yaitu sebesar 36,31% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan secara positif yaitu sebesar 37,64% dari tahun sebelumnya, kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan secara negatif yaitu sebesar 0,13%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pajak daerah. Secara umum analisis pertumbuhan daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif yaitu sebesar 30,54%.

### Analisis Rasio Keuangan

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan derajat desentralisasi :

**Tabel 7. Derajat Desentralisasi Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi
2016	194.791.249.316	2.849.225.683.981	6.83
2017	226.673.797.781	2.876.720.007.058	7.87
2018	212.733.644.000	2.979.978.607.000	7.13
2019	309.296.972.548	3.688.474.554.548	8.38
Total	943.495.663.645	12.394.398.852.587	7.61

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 7 di atas, dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016-2019 tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata derajat desentralisasi sebesar 7,61%. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,38% sedangkan derajat desentralisasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dan ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2016	194.791.249.316	2.560.780.102.664	7.60
2017	226.673.797.781	2.562.668.541.277	1.04
2018	212.733.644.000	2.609.359.168.000	8.15
2019	943.495.663.645	3.018.588.352.000	31.25

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 8 di atas, dapat dilihat dan diketahui rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 rasio kemandirian yang dihasilkan sebesar 7,60%. Pada tahun 2017 rasio kemandirian mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 1,04% kemudian pada tahun 2018 rasio kemandirian kembali mengalami kenaikan sebesar 8,15% dan pada tahun 2019 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 31,25%.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Musi Banyuasin menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat rendah atau masuk kedalam pola hubungan konsultif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

## Analisis Kinerja Pendapatan

### 1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan).

**Tabel 9. Perhitungan Analisis Varians Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Belanja			
	APBD	Realisasi	Selisih	%
2016	2.863.436.764.000	2.625.127.073.243	(238.309.690.756)	91.67
2017	2.877.072.560.238	2.619.480.025.846	(257.592.534.391)	91.04
2018	3.480.078.607.000	2.958.060.291.945	(522.018.315.054)	84.99
2019	3.525.077.794.799	3.160.193.342.676	(364.884.452.122)	89.64
Total	12.745.665.726.037	11.362.860.733.710	(1.382.804.992.327)	89.15

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 9 di atas, analisis varians belanja daerah selama tahun 2016-2019 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja. Secara umum dilihat dari analisis varians belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka-angka persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mencapai 89,15%. Realisasi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 91,67% sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 84,99%.

### 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian inflasi, perubahan nilai ukur rupiah, perubahan cakupan pelayanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

#### a. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016

**Tabel 10. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Pertumbuhan	%
Belanja Operasi	1.490.801.363.516	1.710.307.088.459	219.505.724.943	14.72
Belanja Modal	408.512.810.287	569.702.257.606	161.189.447.319	39.45
Belanja Tak Terduga	5.527.500	2.212.752.333	2.207.225.333	39.93
Transfer	197.111.725.004	345.117.727.178	148.006.002.174	75.08
Total	2.096.431.426.307	2.627.339.825.576	530.908.399.269	25.32

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 10 di atas, seluruh belanja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan belanja secara positif yang menunjukkan pertumbuhan sebesar

25,32%. Pertumbuhan secara positif disebabkan karena ada peningkatan belanja dari tahun sebelumnya baik peningkatan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah tahun 2017

**Tabel 11. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Pertumbuhan	%
Belanja Operasi	1.710.307.008.459	1.639.803.413.474	(70.503.594.985)	(4.12)
Belanja Modal	569.702.257.606	699.529.017.374	129.826.759.768	22.78
Belanja Tak Terduga	2.212.752.333	1.312.563.398	(900.188.935)	(40.68)
Transfer	345.117.727.178	278.835.031.600	(66.282.695.578)	(19.20)
Total	2.627.339.745.576	2.343.480.225.846	(283.859.519.730)	(10.80)

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa hanya belanja modal yang mengalami pertumbuhan belanja secara positif yaitu sebesar 22,78% sedangkan belanja operasi, belanja tak terduga dan transfer mengalami pertumbuhan belanja secara negatif. Belanja operasi mengalami pertumbuhan secara negatif yang disebabkan adanya penurunan pada belanja pegawai, belanja subsidi belanja hibah dan belanja bantuan sosial, belanja tak terduga mengalami pertumbuhan secara negatif disebabkan adanya penurunan belanja dari tahun sebelumnya sedangkan transfer mengalami pertumbuhan belanja secara negatif disebabkan adanya penurunan transfer bantuan keuangan ke desa. Secara umum terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 10,80%.

c. Analisis pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2018

**Tabel 12. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Pertumbuhan	%
Belanja Operasi	1.639.803.413.474	1.697.465.133.203	57.661.719.729	3.51
Belanja Modal	699.529.017.374	871.952.810.972	172.423.793.598	24.64
Belanja Tak Terduga	1.312.563.398	50.056.420	(1.262.506.978)	(96.18)
Transfer	278.835.031.600	388.592.291.350	109.757.259.750	39.36
Total	2.343.480.225.846	2.958.060.291.945	614.580.066.099	26.22

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 12 di atas, belanja operasi, belanja modal dan transfer mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,51%, 24,64%, dan 39,36%. Pertumbuhan belanja secara positif tersebut disebabkan adanya peningkatan belanja dari tahun sebelumnya sehingga menjadi pertumbuhan positif sedangkan belanja tak terduga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 96,18%. Belanja tak terduga mengalami pertumbuhan secara positif karena belanjanya masih rendah dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan terlihat bahwa

pertumbuhan belanja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pertumbuhan positif sebesar 26,22%.

#### d. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019

Tabel 13. Perhitungan Analisis Pertumbuhan Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Pertumbuhan	%
Belanja Operasi	1.697.465.133.203	2.056.860.843.111	359.395.709.908	21.17
Belanja Modal	871.952.810.972	1.102.419.234.360	230.466.423.388	26.43
Belanja Tak Terduga	50.056.420	913.265.205	863.208.785	1.72
Transfer	388.592.291.350	487.019.096.700	98.426.805.350	25.32
Total Pertumbuhan Belanja	2.958.060.291.945	3.647.212.439.376	689.152.147.431	23.29

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 13 di atas, pertumbuhan belanja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif dan tidak ada pertumbuhan belanja secara negatif. Pertumbuhan belanja secara positif disebabkan meningkatnya belanja dari tahun sebelumnya baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga walaupun transfer mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi total pertumbuhannya tidak menunjukkan pertumbuhan negatif melainkan pertumbuhan positif. Secara keseluruhan terlihat bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 23,29%.

### 3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja daerah bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk sarana dan prasarana maka ekonomi masyarakat semakin kecil.

#### a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Modal Belanja terhadap total belanja

**Tabel 14. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2019 (Dalam Rupiah)**

Tahun	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Rasio Keserasian	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2016	1.333.993.671.559	569.702.257.606	50.81	21.7
	2.625.127.073.243	2.625.127.073.243		
2017	1.057.672.408.314	699.529.017.374	40.37	26.7
	2.619.480.025.846	2.619.480.025.846		
2018	1.180.274.015.975	871.952.810.972	39.90	29.47
	2.958.060.291.945	2.958.060.291.945		

2019	2.056.860.843.111	1.102.419.234.360.	65.08	34.88
	3.160.193.342.676	3.160.193.342.676		

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan perhitungan Tabel 14 di atas, terlihat bahwa selama tahun 2016-2019 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap sepanjang memenuhi batas minimal kapasitas aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas.

## KESIMPULAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari LKJIP yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dan pendanaan yang telah dituangkan dalam setiap kegiatan dengan pencapaian keluaran atau hasil yang diharapkan, selain itu juga pencapaian keluaran yang efisien, tidak hanya itu anggaran yang dilaksanakan juga dapat diukur. Laporan keuangan pemerintah sudah dikatakan berkualitas. Hal ini dilihat dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2016-2019 yang telah memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar selalu menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, dengan menjalankan ABK dengan baik dan benar maka akan memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar selalu menyajikan laporan keuangan pemerintah secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka akan memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

## REFERENSI

- Anggraini, Yunita dan Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Djayasinga, Marselina. 2015. *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Endrayani, Komang S. Dkk. 2014. Pengaruh penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksa S1 Universitas Ganesha*.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi, 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Dedi, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Rasdianti, Erlina, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah